

**MENTERI YANG DIRESHUFFLE
DAN PENGGANTINYA**

- MENTERI KEUANGAN
Dicopot: Sri Mulyani Indrawati
Digantikan oleh: Purbaya Yudhi Sadewa

- MENTERI PERLINDUNGAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA (P2MI)
Dicopot: Abdul Kadir Karding
Digantikan oleh: Mukhtarudin

- MENTERI KOPERASI DAN UKM
Dicopot: Budi Arie Setiadi
Digantikan oleh: Ferry Juliantono

- MENTERI KOORDINATOR BIDANG
POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
(MENKO POLHUKAM)
Dicopot: Budi Gunawan
**Pengganti: Belum diumumkan (masih
kosong atau akan diisi ad interim)**

- MENTERI PEMUDA DAN OLAAHRAGA
(MENPORA)
Dicopot: Dito Ariotedjo
Pengganti: Belum diumumkan

- MENTERI HAJI DAN UMRAH
(KEMENTERIAN BARU)
Menteri: Mochamad Irfan Yusuf
Wakil Menteri: Dahnil Anzar
Simanjuntak

Reshuffle Kabinet **Diiringi** **IHSG Anjlok, Ada Apa?**

Presiden RI Prabowo Subianto secara mengejutkan melakukan reshuffle pada lima Menteri dan melantik satu Menteri dan Wakil Menteri di Kementerian baru yaitu Kementerian Haji dan Umroh, Senin (8/9/2025). Lima Menteri yang dicopot yaitu Menteri Keuangan, Sri Mulyani digantikan Purbaya Yudhi Sadewa; Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Abdul Kadir Karding, diganti Mukhtarudin; Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi, diganti Ferry Juliantono; namun, Presiden belum melantik pengganti Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Budi Gunawan, dan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo meski keduanya sudah dicopot. Presiden juga melantik Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf dan Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak. Di satu sisi, pengumuman reshuffle kali ini ternyata diikuti dengan melemahnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Saat penutupan pada Senin (8/9/2025) diketahui bahwa IHSG turun 100,49 poin atau 1,28 persen ke level 7.766. Nah, apakah penurunan IHSG ini terkait dengan reshuffle terhadap lima Menteri tersebut? Jika memang demikian, maka tentunya ada dari Menteri yang diganti tersebut dinilai punya peran penting dalam perekonomian.

DUNIA MALAYSIA



Yusril : 583 Orang Jalani Proses Hukum Buntut Demo Ricuh

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan sebanyak 583 orang menjalani proses hukum terkait demonstrasi dan kerusuhan Agustus 2025. Sebelumnya ada 5.444 orang yang sempat ditangkap, kemudian lebih dari 4.800 sudah dipulangkan ke rumah masing-masing.

Data tersebut disampaikan berdasarkan hasil rapat koordinasi tingkat menteri dan ketua lembaga atau komisi yang berlangsung di Kemenko Kumham Imigrasi, Senin (8/9/2025).

Ratusan orang yang masih ditahan sedang diperiksa intensif di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Makassar, dan Medan. Para demonstran yang masih ditahan itu sedang menjalani assessment oleh penyidik. Polisi akan membedakan siapa aktor intelektual, penyandang dana, operator lapangan, maupun yang hanya ikut-ikutan.

Meski demikian, lanjut Yusril, 583 orang yang ditahan tersebut belum ditetapkan sebagai tersangka, namun untuk kepentingan penyidikan, 583 orang tersebut masih ditahan.

"Masih dalam proses, belum seluruhnya itu tersangka. Kalau tersangka, kan penyidik sudah meyakini bahwa sudah ada dua alat bukti permulaan yang cukup. Kalau ini kan masih dalam satu penyelidikan dan pendalaman," kata dia.

Yusril mengatakan bahwa saat ini pihak aparat tengah mengumpulkan bukti-bukti yang cukup untuk dilimpahkan ke pengadilan. "Itu sudah dihimpun bukti-bukti bahwa 583 orang di seluruh Indonesia itu akan diambil satu langkah hukum yang kemungkinan akan diteruskan ke pengadilan," kata Yusril.

"Begitu juga mereka yang ditahan di Jakarta, itu juga akan diambil langkah-langkah hukum yang sudah cukup bukti-buktinya dan tinggal menunggu waktu kapan kasus-kasus itu akan dilimpahkan ke pengadilan," katanya.

Dia menegaskan, seluruh proses hukum akan menjunjung tinggi HAM. Kemudian hak-hak mereka akan dijamin dan dilindungi, serta memastikan apakah mereka didampingi oleh advokat atau penasihat hukum atau tidak.

"Kalau tidak, maka negara

berkewajiban untuk menyediakan pendampingan gratis kepada mereka," ujar Yusril.

Yusril menambahkan, akan menjamin transparansi dalam seluruh penyelidikan dan penyidikan. "Penyidikan akan dilakukan secara

t r a n s p a r a n s e h i n g g a masyarakat akan melihat, menilai apakah penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, itu b e r t i n d a k profesional, k e m u d i a n bertindak sesuai dengan koridor hukum dan m e n j a m i n perlindungan serta pemenuhan hak asasi manusia pada mereka," jelasnya.

Y u s r i l m e n e g a s k a n , negara tidak boleh berbuat zalim kepada rakyat. Namun, jika ada yang melakukan tindak pidana, maka penegakan hukum harus dijalankan.

"Kami tidak ingin terjadi kezaliman kepada warga masyarakat, kepada rakyat kita sendiri, tetapi kalau rakyat itu diduga melakukan suatu tindak pidana, negara berhak mengambil langkah hukum terhadap mereka," ujarnya.

Sementara itu, Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan Bareskrim Polri tengah melakukan analisis dan assessment terhadap 583 orang yang ditahan dan melakukan kajian serta analisis secara mendalam siapa yang menjadi aktor



Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasarakatan, Yusril Ihza Mahendra, memberikan keterangan usia rapat koordinas tingkat menteri, Senin (8/9/2025).

intelektualnya. "Siapa yang menjadi penyandang dananya, dan siapa yang menjadi operator lapangannya, serta pelaku-pelaku yang saat ini sedang berproses," tegasnya.

"Kami bedakan siapa aktor intelektual, penyandang dana, operator lapangan, maupun yang hanya ikut-ikutan," ujar Dedi.

Sedangkan untuk anak di bawah umur yang ditangkap mendapat perlakuan khusus. Polri membuka opsi penyelesaian dengan mekanisme keadilan restoratif. "Khusus anak kita betul-betul mendapat perlakuan sangat khusus," kata Wakapolri.

Sebelumnya, pada Senin malam (1/9/2025), penyidik Polda Metro Jaya menjemput paksa Direktur Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen. Polisi menuding Delpedro menghasut dan mengajak sejumlah pelajar, termasuk anak di bawah 18 tahun, untuk melakukan "aksi anarkis" lewat media sosial.

Selain Delpedro, Polisi juga menetapkan lima orang lainnya sebagai tersangka. Mereka adalah staf Lokataru, Muzaffar Salim; aktivis Gejayan Memanggil, Syahdan Husein; mahasiswa Universitas Riau (Unri), Khariq Anhar; dan dua individu lainnya berinisial RAP dan FL.

Upaya penyelidikan terhadap enam tersangka ini telah dilakukan Polisi sejak 25 Agustus 2025, bertepatan dengan demonstrasi

pertama yang akhirnya meluas menjadi unjuk rasa besar-besaran hampir satu pekan di Jakarta dan beberapa kota lainnya. Demonstrasi tersebut dipicu oleh polemik tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang berjumlah besar.

Menurut polisi, Delpedro dan lima tersangka lainnya membuat ratusan orang mengikuti demonstrasi. Ajakan-ajakan tersebut ditemukan oleh polisi lewat media sosial, antara lain yang diunggah oleh akun-akun seperti @gejayanememanggil, @aliansimahasiswapenggugat, @blokpolitikpelajar, hingga @lokataru_foundation.

Salah satu unggahan yang dijadikan barang bukti oleh polisi adalah milik akun @lokataru_foundation. Unggahan tersebut merupakan foto yang memuat informasi tentang posko aduan bagi pelajar yang ingin mengikuti demonstrasi pada 28 Agustus 2025.

Foto tersebut bertuliskan "Anda pelajar? Ingin demo? Sudah demo? Diancam sanksi? Atau sudah disanksi? Kita lawan bareng! #jangantaku". Di dalam unggahan tersebut tertera nomor hotline yang bisa dihubungi oleh pelajar yang ingin mengadakan sanksi yang mereka terima karena berunjuk rasa.

Polda Metro Jaya menilai unggahan tersebut dan unggahan-unggahan lainnya sebagai hasutan. "Ada akun-akun yang mencoba memberikan semangat bahwa anak-anak ini boleh datang ke lapangan, boleh melakukan aksi dan akan dilindungi," kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Ade Ary Syam Indradi dilansir Kompas.

Kemudian pada 2 September 2025, Polda Metro Jaya menetapkan Delpedro dan Muzaffar sebagai tersangka penghasutan untuk melakukan anarkisme, dan disangkal dengan pasal penghasutan, perlindungan anak, dan ITE. (han,ant,ist/lut)



Masih dalam proses, belum seluruhnya itu tersangka. Kalau tersangka, kan penyidik sudah meyakini bahwa sudah ada dua alat bukti permulaan yang cukup. Kalau ini kan masih dalam satu penyelidikan dan pendalaman,"

YUSRIL IHZA MAHENDRA

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasarakatan,

DPR : PERLU KOMITE ETIK KOPERASI DESA MERAH PUTIH

Wakil Ketua Komisi VI DPR, Nurdin Halid, memandang perlunya Komite Etik untuk mengawasi pengelola koperasi desa merah putih. Selain itu juga menegaskan perlunya akuntabilitas dan efektivitas dalam pengelolaan anggaran 2026.

Nurdin mengatakan untuk pengawasan sudah ada alokasi anggaran Rp 6,8 miliar yang disiapkan Kementerian Koperasi, sehingga bisa membenteng Komite Etik. “Sebanyak 80 ribu Kopdes Merah Putih yang telah dibentuk memerlukan pengawasan yang efektif dan fokus. Dengan anggaran sebesar itu, mustahil pengawasan bisa berjalan maksimal,” kata Nurdin dalam rapat kerja bersama Menteri Koperasi Budi Arie sebelum di-reshuffle, Senin (8/9/2025).

Pembinaan dan pengawasan koperasi dalam jumlah besar bukan hal mudah, apalagi jika bercampur dengan kepentingan politik dan pencitraan. Karena itu, ia menyarankan pemerintah membentuk komite etik di semua tingkatan, mulai dari kabupaten, provinsi, hingga pusat.

Ia juga mengkritik aturan yang menempatkan kepala desa sebagai ex officio ketua pengawas koperasi. Menurut dia, hal tersebut bertentangan dengan prinsip dasar koperasi yang menekankan kemandirian dan demokrasi anggota.

“Kooperasi itu intinya rakyat untuk rakyat. Semua pengurus dan pengawas seharusnya dipilih oleh anggota melalui rapat anggota, bukan ditentukan jabatan,” ujarnya dikutip tempo.

Di lain sisi, Nurdin menekankan perlunya roadmap dan indikator jelas untuk mengukur keberhasilan Kopdes Merah Putih. Ia menilai, jika keberhasilan hanya dihitung dari jumlah koperasi yang terbentuk, justru menjadi tanda kegagalan sejak awal.

Ia juga memberi peringatan terkait skema pinjaman online yang ditawarkan koperasi. Menurutnya, jika terjadi kemacetan, pinjaman itu dijamin dengan dana desa. Hal ini berbahaya karena bisa menimbulkan moral hazard dan membebani

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Kopdes Merah Putih tidak boleh terjebak pada praktik masa lalu seperti KUD era Orde Baru. Pemerintah harus berhati-hati agar program ini benar-benar menjadi fondasi ekonomi desa, bukan sekadar proyek politik,” ujar Nurdin.

Nurdin juga menegaskan perlunya akuntabilitas dan efektivitas dalam pengelolaan anggaran. Terlebih lagi anggaran Kementerian Koperasi sebesar Rp937,4 miliar telah disetujui, dan ditambah dengan usulan tambahan anggaran sebesar Rp3,87 triliun. Anggaran tersebut cerminan komitmen negara memperkuat koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional.

“Lonjakan anggaran ini membuka peluang besar mempercepat transformasi koperasi, tetapi harus dipastikan tiga hal: kapasitas serapan anggaran, efektivitas belanja, dan koordinasi pusat-daerah yang terukur,” tegas Nurdin.

Dia menandakan setiap rupiah dari anggaran tersebut harus berdampak langsung pada penguatan kelembagaan, digitalisasi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, besarnya alokasi dana dekonsentrasi, mencapai Rp1,5 triliun dari usulan tambahan, menuntut adanya sistem monitoring ketat agar tidak terjadi

tumpang tindih program di daerah.

“Setiap program harus tepat sasaran, jangan sampai ada anggaran besar tetapi hasilnya minim,” ujarnya.

Di sisi lain, Komisi VI DPR menyatakan dukungan penuh terhadap langkah strategis Kementerian Koperasi, mulai dari transformasi digitalisasi hingga penguatan sektor keuangan koperasi. Namun, ujarnya, dukungan itu harus disertai dengan tuntutan agar pelaksanaan dilakukan secara transparan dan berorientasi hasil nyata.

“Dengan pengelolaan yang akurat, koperasi bisa benar-benar menjadi pilar utama ekonomi kerakyatan dan motor penggerak pembangunan nasional sesuai RPJMN 2025–2029 serta Asta Cita,” tandas Politisi Fraksi Partai Golkar itu.

Sementara itu, Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi (sebelum di-reshuffle) meminta tambahan anggaran sebesar Rp 7,85 triliun untuk tahun anggaran 2026. Budi Arie menjelaskan, anggaran reguler Kementerian Koperasi untuk 2026 sebelumnya telah ditetapkan sebesar Rp 937 miliar.

Ia mengatakan dana tersebut terdiri dari Rp 711 miliar rupiah murni dan Rp 226 miliar dari penerimaan BLU Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi. Namun, kata dia, jumlah tersebut belum mencukupi untuk mendukung berbagai program strategis, terutama penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) yang saat ini jumlahnya lebih dari 80 ribu unit di seluruh Indonesia.

“Tambahan anggaran ini kami ajukan agar program Kopdes Merah Putih bisa beroperasi secara optimal, termasuk untuk digitalisasi, tata kelola, pendampingan, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia koperasi,” ujar Budi Arie.

Dalam usulan tambahan sebesar Rp 7,85 triliun itu, Budi Arie merinci alokasi anggaran di antaranya penguatan kelembagaan dan tata kelola koperasi sebesar Rp 210 miliar, transformasi ekosistem digital koperasi Rp 480 miliar, pengembangan usaha koperasi Rp 299 miliar dan peningkatan daya saing koperasi Rp 298 miliar.

Kemudian tambahan anggaran itu juga dialokasikan untuk penguatan sektor keuangan koperasi sebesar Rp 184 miliar, pengawasan koperasi Rp 234 miliar, pengembangan SDM koperasi Rp 598 miliar, penguatan data dan informasi koperasi Rp 460 miliar, dukungan pemberdayaan koperasi di daerah (Dana Dekonsentrasi) Rp 4,52 triliun dan dukungan untuk Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Rp 50 miliar.

Program Kopdes Merah Putih sudah masuk dalam program strategis nasional. Karena itu, Budi Arie melanjutkan, pengoperasiannya membutuhkan penguatan dari sisi kelembagaan, sumber daya manusia, hingga sistem pengawasan berbasis anggota.

Ia mengatakan salah satu fokus utama adalah penyediaan pendamping koperasi. Saat ini, anggaran Rp 156 miliar hanya cukup untuk mendukung 8.000 pendamping selama tiga bulan. Dengan tambahan anggaran, pendampingan dapat diperluas sepanjang tahun dan menjangkau lebih banyak koperasi.

Selain itu, Kementerian Koperasi menyiapkan platform digital koperasi yang dapat diakses publik melalui tautan kopdesmerahputih.kop.id. Platform ini memungkinkan pemantauan profil dan operasional Kopdes Merah Putih secara real time sebagai bentuk transparansi.

Budi Arie menegaskan, tambahan anggaran ini telah mendapatkan dukungan awal dari Komisi VI DPR RI pada rapat 9 Juli 2025 lalu. Ia berharap DPR bersama pemerintah dapat mengawal realisasi anggaran tambahan tersebut.

“Kementerian Koperasi terbuka terhadap penyesuaian sesuai kondisi fiskal negara. Namun semangat kita tetap sama, yakni memperkuat koperasi sebagai fondasi ekonomi kerakyatan, terutama melalui program Kopdes Merah Putih,” kata Budi Arie. (han,rls,ist/lut)



Sebanyak 80 ribu Kopdes Merah Putih yang telah dibentuk memerlukan pengawasan yang efektif dan fokus. Dengan anggaran sebesar itu, mustahil pengawasan bisa berjalan maksimal,”

NURDIN HALID

Wakil Ketua Komisi VI DPR

Bensin SPBU Swasta Masih Langka

KPPU SELIDIKI KEBIJAKAN IMPOR BBM

Kelangkaan bensin di SPBU swasta masih berlanjut. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengonfirmasi tengah melakukan kajian terhadap kebijakan durasi impor bahan bakar minyak (BBM) yang diubah oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dari 1 tahunan menjadi per 6 bulan.

Kajian kebijakan oleh KPPU tersebut akan menentukan apakah kebijakan yang diambil oleh Kementerian ESDM tersebut mengarah kepada kebijakan yang menghambat persaingan usaha atau tidak.

“Iya dalam proses kajian, fokus ke kebijakan pengaturan impor BBM,” kata Deputy Bidang Kajian dan Advokasi KPPU Taufik Ariyanto, Senin (8/9/2025).

Adapun, penyelidikan itu dilakukan KPPU sebagai buntut dari kasus kelangkaan BBM nonsubsidi—khususnya bensin RON 92 ke atas — di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta, terutama milik Shell Indonesia dan BP-AKR akhir-akhir ini.

Dalam kaitan itu, Taufik menjelaskan jika kebijakan durasi izin impor yang dipangkas tersebut terbukti menghambat persaingan usaha, KPPU akan memberikan rekomendasi kepada kementerian teknis terkait, dalam hal ini Kementerian ESDM.

KPPU juga menegaskan telah melayangkan undangan kepada badan usaha (BU) hilir migas swasta yakni Shell Indonesia dan BP-AKR untuk dimintai keterangan terkait dengan kebijakan itu.

Selain itu, Taufik menyebut KPPU juga mengundang perwakilan Kementerian ESDM untuk melakukan diskusi terkait dengan aturan impor BBM tersebut.

“Kami masih cross check temuan dan data yang sudah ada, termasuk nanti dengan Kementerian ESDM juga,” tegas Taufik.

Dimintai konfirmasi secara terpisah, Ketua KPPU Fanshurullah Asa juga membenarkan soal pengusutan dugaan kebijakan yang menghambat persaingan usaha sektor hilir migas tersebut.

KPPU, kata Fanshurullah, telah memanggil PT Pertamina (Persero), Shell Indonesia, BP-AKR, dan Kementerian ESDM untuk mendalami hal tersebut.

“Intinya lagi dilakukan kajian [oleh] KPPU penyebabnya, lagi memanggil Kementerian ESDM, Pertamina, Shell, dan BP-AKR,” kata pria yang akrab disapa Ifan, Senin (8/9/2025).

Tanda-tanda Monopoli

Pada perkembangan lain, Asosiasi Perusahaan Migas Nasional (Aspermigas) menilai wacana pemerintah agar BU hilir migas membeli BBM dari kilang milik



Petugas memberi info ke pelanggan mengenai stok BBM di SPBU Shell, Jalan DR. Satrio. (Dok. Bloomberg)

Pertamina merupakan indikasi persaingan usaha yang tidak sehat di bisnis SPBU.

Bisnis di lini hilir migas pun disebut rawan dimonopoli oleh perusahaan pelat merah, meski sudah diliberalisasi sejak 2001.

“Enggak sehat ini kan jadi kayak menekan persaingan [usaha] gitu, padahal persaingan itu bagus untuk konsumen,” kata Ketua Komite Investasi Aspermigas Moshe Rizal saat

dihubungi, akhir pekan lalu.

Adapun, arahan agar badan usaha—seperti Shell, BP-AKR, dan Vivo — membeli BBM dari kilang Pertamina mencuat di tengah isu gangguan pasokan bensin RON 92 dan 95 di SPBU swasta akhir-akhir ini.

Alih-alih membatasi durasi izin impor atau memaksa BU swasta membeli BBM dari perusahaan milik negara, Moshe menilai pemerintah seharusnya mendorong agar bisnis

tersebut tidak dimonopoli oleh Pertamina.

Menurutnya, persaingan usaha bagi SPBU perlu dilakukan untuk mempercepat perbaikan, kualitas pelayanan dan produk SPBU, hingga inovasi; khususnya dari sisi harga.

Moshe pun mempertanyakan ihwal isu durasi izin impor BBM yang diperpendek menjadi per 6 bulan dari sebelumnya 1 tahunan. Kondisi tersebut, kata dia, ditafsirkannya sebagai tindakan untuk menghalangi impor minyak oleh BU swasta (wid, blo, ist/ dya)

Legislatur Minta Bahlil Jamin Kualitas Pertamina

ANGGOTA Komisi XII DPR dari Fraksi PKB, Ratna Juwita Sari mengingatkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang dipimpin Bahlil Lahadalia untuk menjamin kualitas bahan bakar minyak (BBM) di SPBU Pertamina, pasti oke.

Hal ini disampaikan Ratna menyusul terjadinya kekosongan stok BBM di sejumlah SPBU swasta di beberapa wilayah. Kekosongan stok BBM di beberapa SPBU swasta itu, mendorong masyarakat beralih ke SPBU milik Pertamina.

“Ketika SPBU swasta mengalami kekosongan stok, masyarakat akan mencari alternatif lain yang paling dekat, serta dapat dipercaya, yaitu SPBU Pertamina. Ini menjadi tanggung jawab besar Kementerian ESDM untuk memastikan BBM yang dijual tetap berkualitas. Agar tidak merugikan konsumen dan menjaga kepercayaan publik terhadap penyedia BBM nasional,” ujar Ratna di Jakarta, Senin (8/9/2025).

Ia menyatakan, kualitas BBM harus menjadi prioritas utama

Kementerian ESDM, agar kepercayaan masyarakat tidak kembali ambruk.

Di sisi lain, Bendahara Umum DPP Perempuan Bangsa ini, menekankan, pentingnya pengawasan bisnis BBM dilakukan secara transparan dan akuntabel.

“Pengawasan yang ketat dan transparan akan mencegah terjadinya praktik curang, serta memastikan produk yang beredar memenuhi standar yang telah ditetapkan,” kata Ratna.

Sebagai langkah konstruktif, Ratna mengusulkan agar pemerintah dan DPR bersama-sama mengoptimalkan potensi sumber minyak di dalam negeri, dan mendorong inovasi di sektor energi nasional. Dengan demikian, ketertarikan pada impor dapat diminimalisir dan kedaulatan energi Indonesia semakin kuat.

Sebagai informasi, kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) terjadi di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) milik Shell, dan

Daftar Harga BBM di semua SPBU DKI Jakarta per 8 September 2025:

SPBU Pertamina DKI Jakarta

- Pertamax: Rp 12.200 per liter
- Pertamax Turbo: Rp 13.100 per liter
- Pertamax Green: Rp 13.000 per liter
- Pertamina Dex: Rp 13.850 per liter
- Dexlite: 13.600 per liter

SPBU Shell

- Shell Super: Rp 12.580 per liter
- Shell V-Power: Rp 13.140 per liter
- Shell V-Power Diesel: Rp 14.130 per liter
- Shell V-Power Nitro+: Rp 13.300 per liter

SPBU BP

- BP Ultimate: Rp 13.120 per liter
- BP 92: Rp 12.610 per liter
- BP Ultimate Diesel: Rp 14.140 per liter

SPBU Vivo Energy

- Revvo 90: Rp 12.530 per liter
- Revvo 92: Rp 12.610 per liter
- Revvo 95: Rp 13.140 per liter
- Diesel Primus Plus: Rp 14.140 per liter

SPBU Mobil

- Gasoline 92: Rp 12.615 per liter.

British Petroleum (BP) di Jakarta dan sejumlah kota lainnya sejak Rabu (3/9/2025).

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia membantah stok bahan bakar minyak (BBM) di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) milik swasta, mengalami kelangkaan.

Yang benar, menurut Menteri Bahlil, pemerintah malah menambah jatah impor BBM untuk SPBU swasta sebesar 10 persen dari kuota pada 2024. (wid, rls, ist/ dya)

MAKAN BERGIZI GRATIS BOLEH TIDAK HALAL, ASAL...

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana membolehkan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak harus halal. Syaratnya jika seluruh penerima MBG beragama non-muslim.

Izin menu MBG tak halal disampaikan kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG. Jika penerima merupakan non-muslim, maka kearifan lokal menjadi menu utama. Itu sekalipun produknya tidak masuk dalam kategori halal.

"Kalau ada satu SPPG yang 100 persen (penerima MBG) non-muslim, maka kearifan lokal sudah boleh dilakukan karena bagi mereka halal juga. Tetapi kalau ada satu saja yang muslim, maka wajib ada sertifikat halal," kata Dadan di Kantor Bappenas, Jakarta, Senin (8/9/2025).

Menurutnya, prinsip kehalalan dalam penyediaan menu MBG turut dikontrol Badan Penyelenggaraan Produk Halal (BPJPH).

"Kami sudah instruksikan kepada seluruh SPPG di seluruh Indonesia, jika ada satu saja penerima manfaat yang muslim, maka SPPG itu wajib bersertifikat halal," tegas Dadan.

Cek Food Tray ke China

Sebelumnya, BPJPH akan memastikan unsur halal ompreng atau food tray makan bergizi gratis (MBG). Menyusul dugaan ompreng MBG mengandung minyak babi yang jadi perhatian masyarakat.

Kepala BPJPH, Haikal Hassan memastikan akan berangkat ke China untuk mengecek langsung proses produksi ompreng MBG tersebut. Dia tidak ingin berspekulasi atas isu ompreng MBG mengandung minyak babi.

"Mudah-mudahan dalam minggu ini kami akan berangkat ke China, karena kami tidak melayani isu, tidak melayani berita-berita yang hoaks, kami harus menyaksikan lebih dulu, kami harus audit lebih dulu semuanya," kata Haikal usai MoU Badan Gizi Nasional (BGN) dan BPJPH di Kantor Bappenas, Jakarta, Senin (8/9/2025).

Dia mengamini sejumlah ompreng atau food tray MBG itu didatangkan dari China. Sebab produksi dalam negeri masih belum bisa memenuhi seluruh kebutuhannya. "Sebagian, karena kan kebutuhan lokal ini tidak sanggup memenuhi, sehingga sebagian impor," jata Haikal.

Dia memastikan seluruh rantai pasok MBG harus dijamin halal. Baik menu maupun barang-barang yang digunakan. "Jadi dapurnya tersertifikasi halal, menunya tersertifikasi

halal, dan peralatan-peralatan yang dipakai juga tersertifikasi halal. Bahkan kepala dapurnya akan menjadi penyelia-penyelia halal yang akan mengontrol daily activity dari penyajian untuk anak-anak," tegas dia.

Hal senada dikatakan Dadan. "Mungkin nanti Pak Kepala Badan (BPJPH) harus pergi ke China buat inspeksi seluruh tempat makan yang digunakan oleh Badan Gizi (Nasional), sehingga keluar pernyataan bahwa seluruhnya halal supaya tidak membuat keraguan."

Dia menyampaikan, BGN serius menanggapi isu salah satu kecamatan di Sulawesi Utara yang tidak mau menerima MBG karena ompreng diragukan kehalalannya. Untuk itu, pihaknya menyambut baik penandatanganan MoU antara BGN dengan BPJPH yang dijemputi Kementerian Bappenas/BPN.

Dia juga menilai, agenda ini pun meningkatkan jaminan halal program MBG sebagai aspek yang penting



secara psikologis di tingkat nasional.

"Ini betul-betul langkah strategic untuk menjamin kepada penerima manfaat (MBG) bahwa seluruh yang dikonsumsi halal. Alhamdulillah, ini terjadi karena berkaitan dukungan semua pihak," ujarnya.

Dadan pribadi menghormati sebagian masyarakat di Sulawesi Utara yang tidak menerima MBG. Terpenting, Badan Gizi Nasional sebagai penyelenggaraan program makan gratis telah memberikan hak yang harus diberikan.

"Untuk sementara bagi mereka yang tidak ingin menerima haknya, kami hormati dan melakukan langkah persuasi untuk diskusi lebih lanjut sehingga kita clear. Seringkali ada isu di media yang memang perlu kita tindaklanjuti agar semua orang merasa yakin bahwa apa yang diterima sesuai dengan keimanan masing-masing," ucapnya. (wid,rls,ist/dya)

DATA KEBUTUHAN PANGAN UNTUK SATU DAPUR MBG DALAM SATU BULAN:

(Rincian pangan ini dipersiapkan untuk 3.000 hingga 4.000 penerima manfaat)

- Beras
3000 kilogram per bulan
- Telur
12.000 butir per bulan
- Minyak
1.100 liter per bulan
- Ikan
1.700 kilogram per bulan
- Daging
2.200 kilogram per bulan
- Sayur
2.100 kilogram per bulan
- Buah
3.100 kilogram per bulan
- Susu
4.000 kotak per bulan

Pasokan Susu untuk MBG Masih Seret

INSPEKTORAT Utama Badan Gizi Nasional (BGN) RI Brigjen (Purn) Jimmy Alexander Adirman menyebut pasokan susu untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga saat ini masih seret. Pasokan susu yang dibutuhkan untuk program MGB baru terpenuhi sekitar 20 hingga 30 persen dari total yang dibutuhkan.

"Susu akan menjadi kendala karena sampai hari ini sudah diprediksi bahwa susu itu terpenuhi hanya 20 persen. Kalau telur, daging mungkin masih (terpenuhi), tapi susu ini sudah menjadi masalah nasional bahwa kemampuan produsen susu kita baru di 20 sampai 30 persen maksimal," kata Jimmy.

Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam acara Silatnas I Tahun 2025, Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia: MBG Masa Depan Indonesia Emas 2045 di Jakarta, Senin (8/9/2025).

Maka dari itu, ia mengarahkan para pengusaha makan bergizi gratis untuk mensiasati keterbatasan pasokan susu tersebut. Supaya, jumlah nutrisi yang dibutuhkan per

hari tetap terpenuhi. "Silakan teman-teman pengusaha makan bergizi GAPEMBI (Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia) ini mensiasati bagaimana caranya berapa kali seminggu susunya, kemudian kekurangan susu itu ditutup dengan apa, sehingga jumlah kalori yang dibutuhkan per hari itu gramasinya tetap terpenuhi," ujar Jimmy.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Deputi Tata Kelola BGN RI Ermia Sofiyessi mengatakan, pemenuhan pasokan susu untuk MBG butuh kerjasama antar stakeholder terkait.

Saat ini, katanya, Kementerian Pertanian juga sedang mengupayakan pemenuhan susu untuk MBG. "Kita tahu belum tentu semua daerah itu penghasil susu. Makanya kita upayakan ada mungkin daerah-daerah yang diciptakan untuk bisa menghasilkan susu gitu dengan mengalokasikan sapi," kata Ermia saat ditemui di kesempatan yang sama.

Opsi lainnya, sambung Ermia,

setidaknya ada teknologi yang dihibridkan agar susu bisa lebih tahan lama. Sebagai informasi, pemerintah menargetkan ada sebanyak 30.000 dapur MBG beroperasi di seluruh Indonesia hingga akhir tahun 2025.

Kata Jimmy, hingga saat ini, total ada 7.300 dapur MBG yang siap dioperasionalkan, sementara sekitar 15.000 dapur tambahan sudah siap diverifikasi. Sementara itu, pada akhir November ditargetkan akan ada sekitar 25.000 titik dapur MBG yang sudah aktif. Dari total target 30.000 dapur MBG, katanya, sekitar 6.000 dapur ditargetkan untuk daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). (wid,ist/dya)

PENATAAN PARKIR DI KOTA MALANG DIPERKETAT, BAKAL ATUR ULANG TITIK RESMI



Anggota Komisi C DPRD Kota Malang, Dito Arief Nurakhmadi. (Santi/Lentera)

MALANG - Upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Malang untuk menata perparkiran bakal semakin ketat. Melalui Peraturan Daerah (Perda) Penyelenggaraan Perparkiran yang tengah difinalisasi, seluruh titik parkir di akan dipetakan ulang. Serta

ditetapkan secara resmi melalui Surat Keputusan (SK) Wali Kota.

Anggota Komisi C DPRD Kota Malang, Dito Arief Nurakhmadi, menjelaskan pemetaan ulang titik parkir ini menjadi salah satu poin baru dalam Perda. Dengan penetapan resmi, titik parkir yang legal akan tercatat dan wajib memberikan karcis kepada masyarakat pengguna jasa parkir.

"Iya, nanti titik parkir yang akan masuk di SK adalah yang legal. Harus ada karcis sebagai bukti resmi," ujar Dito, dikutip pada Senin (8/9/2025).

Menurut Dito, pemberlakuan karcis ini bukan hanya sekedar bukti transaksi, tetapi juga menjadi dasar perlindungan bagi masyarakat. Perda

baru, dikatakannya akan mengatur mekanisme jaminan atau asuransi apabila terjadi kehilangan kendaraan maupun barang, yang sebelumnya tidak diatur dalam regulasi lama.

Selain itu, norma baru dalam Perda juga akan mencakup kewajiban bagi pemilik usaha modern yang masuk dalam kategori pajak parkir. Untuk dapat menyediakan juru parkir khusus yang mengelola lahan parkirnya. Hal ini dilakukan untuk memperjelas batas antara titik parkir yang masuk kategori retribusi dan yang termasuk pajak parkir.

"Kalau parkir menggunakan badan jalan hitungannya retribusi, sedangkan yang khusus masuk dalam pajak parkir. Ada pendataan juga mana yang termasuk pajak parkir dan mana yang masuk retribusi," jelasnya.

Dito menambahkan, pembaruan lain yang akan diatur dalam Perda adalah skema imbal jasa bagi pengelola parkir.

Nantinya, akan ada pembagian resmi antara pemerintah kota dengan pengelola, dengan pola 60-40 persen

atau 70-30 persen. Hal ini bertujuan agar hubungan antara pemerintah, pengelola, dan juru parkir lebih jelas secara hukum.

Tidak hanya itu, menurutnya, Perda juga membuka peluang bagi pihak ketiga, baik perorangan maupun badan usaha, untuk terlibat dalam pengelolaan parkir. Mereka dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah, misalnya dengan menjadikan lahan atau gedung yang dimiliki sebagai area parkir resmi.

Dito menegaskan, saat ini draf Perda Penyelenggaraan Perparkiran masih dalam tahap evaluasi di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur. Proses ini diperlukan sebelum nantinya dibawa kembali ke Kota Malang untuk diparipurnakan di DPRD.

"Kalau merujuk ke waktu, mestinya bulan ini atau maksimal bulan depan sudah bisa diparipurnakan. Kalau ada revisi dari provinsi akan kita sesuaikan, tapi kalau tidak ada, segera disahkan menjadi Perda," pungkasnya. (Santi/Dya)

LULUSAN TERSERAP INDUSTRI TEMBAKAU, PEMKAB MALANG GENCARKAN PELATIHAN GILING SKT

MALANG - Ratusan lulusan pelatihan giling sigaret kretek tangan (SKT) yang digelar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, telah berhasil terserap di industri tembakau. Untuk memperluas kesempatan kerja, Pemkab Malang terus menggenjalkan program pelatihan serupa. Dengan melibatkan puluhan peserta pada setiap tahapannya.

"Hari ini kami kembali mengadakan pelatihan menggiling SKT untuk masyarakat Kabupaten Malang. Ada sekitar 50 peserta. Waktunya 5 hari, mulai tanggal 8 September ini sampai 12 September 2025," ujar Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Malang, Nor Fuad Fauzi, ditemui usai membuka pelatihan giling SKT, Senin (8/9/2025).

Fuad menambahkan, program pelatihan giling SKT ini sudah berjalan secara berkelanjutan, dan saat ini memasuki pelatihan tahap ke 8. Hingga kini, menurutnya, tercatat sudah ada 350 peserta yang mengikuti pelatihan dan seluruhnya telah diterima bekerja di berbagai perusahaan industri tembakau.

"Ini totalnya sudah pelatihan tahap

yang kedelapan. Mudah-mudahan bisa terus kami lakukan agar masyarakat Kabupaten Malang bisa bekerja di perusahaan giling rokok," tambah Fuad.

Menurutnya, peningkatan jumlah industri tembakau di Kabupaten Malang juga memperbesar kebutuhan tenaga kerja di sektor tersebut.

Data menunjukkan, pada tahun 2024 terdapat 102 industri, sementara per Maret 2025 jumlahnya meningkat menjadi 112 industri. "Hal ini menunjukkan kebutuhan tenaga kerja sumber daya manusia (SDM) di sektor industri tembakau di Kabupaten Malang semakin banyak dibutuhkan," jelasnya.

Lebih lanjut, Disperindag menargetkan pelatihan giling SKT dapat dilaksanakan hingga 10 tahap. Program pelatihan yang diberikan juga diperluas dengan pelatihan bidang manajemen, sebagai bagian dari upaya peningkatan performa industri tembakau di daerah.

Kehadiran program pelatihan ini disambut baik oleh pelaku industri, salah satunya PT Gudang Baru Berkah. Kepala Bagian SDM perusahaan tersebut, Fariz Ash Siddiq, menyampaikan pihaknya merasa

terbantu dengan adanya fasilitasi dari pemerintah daerah.

"Alhamdulillah kami dapat kuota 50 orang. Ini pelatihan produktivitas penggilingan SKT. Jadi ini benar-benar yang kami butuhkan. Alhamdulillah pemerintah hadir untuk memfasilitasi kami, terutama saat permintaan pasar sedang tingginya," ujar Fariz.

Fariz menambahkan, peserta yang mengikuti pelatihan seluruhnya adalah calon karyawan. Mereka dibekali keterampilan dasar mulai dari nol sebelum nantinya direkrut menjadi pekerja tetap.

"Kami ingin mengubah mindset generasi saat ini, kalau pekerjaan menggiling SKT ini banyak dibutuhkan. Setelah pelatihan selesai, targetnya bisa langsung direkrut jadi karyawan," katanya. Fariz menyebutkan, perusahaannya saat ini memiliki tenaga kerja giling sekitar 1.300 orang, ditambah bagian pengepakan



Peserta pelatihan giling rokok sigaret kretek tangan (SKT) Disperindag Kabupaten Malang, Senin (8/9/2025). (Santi/Lentera)

sebanyak 400 orang. Total, ada sekitar 1.700 pekerja yang terlibat langsung dalam proses produksi.

"Karena SKT itu memang harus dikerjakan dengan tangan, tidak bisa dengan mesin. Jadi industri ini sudah pasti padat karya. Dengan adanya pelatihan dari Disperindag ini, kami sangat terbantu," jelas Fariz. (Santi/Dya)



Mantan Menteri Luar Negeri Jepang, Toshimitsu Motegi. (Foto: Reuters)

EKS MENLU 'PEMBISIK TRUMP' MAJU JADI CALON PM JEPANG

Toshimitsu Motegi, Mantan Menteri Luar Negeri Jepang yang dikenal dengan julukan "Pembisik Trump", resmi menjadi kandidat pertama yang mendeklarasikan diri untuk mencalonkan sebagai pemimpin baru Jepang, usai Perdana Menteri Shigeru Ishiba menyatakan pengunduran dirinya.

Motegi sedang berupaya memimpin Jepang menghadapi gejala baru yang berasal dari kenaikan harga pangan dan dampak tarif Amerika Serikat (AS) terhadap sektor otomotif yang krusial.

Motegi menyampaikan kepada wartawan pada Senin (8/9/2025) waktu setempat bahwa dirinya maju sebagai kandidat perdana menteri baru Jepang, sehari setelah Ishiba mengumumkan pengunduran diri. Ishiba sendiri menyatakan bahwa keputusan mundurnya dipicu oleh hasil buruk yang dialami LDP dalam dua pemilu terakhir.

Dalam 11 bulan masa kepemimpinannya yang sarat gejolak, Ishiba kehilangan mayoritas dukungan di kedua majelis parlemen Jepang. Situasi tersebut menjadi pukulan keras bagi LDP yang hampir tak tergoyahkan dalam kekuasaan sejak 1955.

Seruan berulang kali agar Ishiba bertanggung jawab atas kekalahan tersebut, menurut laporan, membuat posisinya tidak dapat dipertahankan.

Usai pengunduran diri Ishiba, Partai Demokrat Liberal (LDP) yang sejak lama dominan dalam pemerintahan Jepang akan memilih ketua barunya, dilaporkan pada awal Oktober mendatang.

"Kita harus memajukan Jepang, menyelesaikan masalah-masalah sulit di dalam negeri dan luar negeri," cetus Motegi saat berbicara kepada wartawan, seperti dikutip dari AFP, Senin (8/9/2025).

"Saya telah memutuskan untuk mencalonkan diri," ucapnya.

Motegi yang berusia 69 tahun ini, merupakan mantan Sekretaris Jenderal LDP dan mantan Menteri Perdagangan.

Dengan bahasa Inggris yang fasih,

Motegi yang lulusan Harvard ini dijuluki sebagai "Pembisik Trump" Presiden AS Donald Trump karena

kepiawaiannya dalam mengurus perundingan dagang AS-Jepang yang sulit.

Selain Motegi, kandidat lainnya untuk PM baru Jepang adalah Sanae Takaichi, seorang nasionalis garis keras berusia 64 tahun dan mantan drummer heavy metal yang kalah dari Ishiba dalam pemilihan tahun 2024 lalu. Jika terpilih, Takaichi akan menjadi PM wanita pertama di Jepang.

Menteri Pertanian era Ishiba,

Shinjiro Koizumi, yang baru-baru ini ditugaskan menurunkan harga beras, juga bisa mencalonkan diri. Koizumi yang berusia 44 tahun merupakan putra dari mantan PM Jepang Junichiro Koizumi.

Para calon lainnya termasuk Yoshimasa Hayashi yang merupakan juru bicara pemerintahan Ishiba dan Takayuki Kobayashi yang merupakan mantan Menteri Keamanan Ekonomi. (AFP, ist/nei)

PROFIL TOSHIMITSU MOTEGI

Keterangan	Detail
Nama Lengkap	Toshimitsu Motegi
Julukan	Julukan: "Pembisik Trump" karena kedekatan dengan Donald Trump saat menjabat Menlu.
Tempat, Tanggal Lahir	Ashikaga, Tochigi, 7 Oktober 1955.
Pendidikan	Universitas Tokyo (Ekonomi), Harvard Kennedy School (Kebijakan Publik), eks konsultan McKinsey.
Karier Politik	Anggota parlemen LDP sejak 1993; pernah menjabat METI, Menteri Urusan Konsumen & Sains Teknologi, Menlu (2019-2021).
Peran Diplomasi	Pimpin perundingan dagang dengan AS & Uni Eropa; dijuluki "Trump Whisperer".
Ciri Politik	Politikus senior LDP, teknokrat ekonomi & diplomasi, kandidat kuat suksesi PM Jepang.

Mentan Shinjiro Diduga jadi Pemicu Ishiba Lengser

MENTERI Pertanian, Shinjiro Koizumi, disebut-sebut turut berperan dalam keputusan Perdana Menteri Shigeru Ishiba untuk mengundurkan diri.

Menurut sumber yang dikutip Japan Times, Koizumi diduga menyarankan Ishiba untuk mengundurkan diri secara sukarela demi mencegah terjadinya perpecahan besar di internal Partai Demokrat Liberal (LDP) yang sedang berkuasa.

Sabtu (6/9/2025) malam, Koizumi bersama mantan Perdana Menteri Yoshihide Suga mendatangi kediaman resmi perdana menteri. Suga hanya singgah sekitar 30 menit, sementara Koizumi berbincang dengan Ishiba selama dua jam.

"Dalam pertemuan itu, Koizumi mendesak Ishiba untuk menghindari

pemungutan suara pada Senin soal apakah LDP harus menggelar pemilihan ketua lebih awal," ujar sumber tersebut.

Koizumi diketahui menolak wacana pembubaran parlemen untuk menggelar pemilu cepat, seperti yang sempat disinggung Ishiba.

Tekanan agar Ishiba mundur semakin kuat. Hasil survei menunjukkan banyak anggota parlemen dan cabang LDP mendukung percepatan pemilihan ketua partai. Jika lebih dari setengah anggota parlemen (172 suara) dan 47 cabang prefektur mendukung, pemilihan harus dilakukan.

Menurut jajak pendapat Yomiuri Shimbun per Jumat, dari 342 anggota LDP dan cabang prefektur yang berhak ikut pemungutan suara, 149

mendukung percepatan pemilihan, 48 menolak, dan sisanya masih belum menentukan. Survei Kyodo juga menyebut 120 anggota condong mendukung pemilihan awal, sementara sekitar 40 persen anggota belum memutuskan.

Jika mayoritas mendukung pemilihan lebih awal, Ishiba hampir pasti akan mundur, karena hal itu menunjukkan ia kehilangan dukungan dari partainya.

Pemungutan suara pada Senin (8/9/2025), akan menjadi puncak konflik internal LDP yang sudah berlangsung berminggu-minggu.

Ishiba sebelumnya bersikeras bertahan meski LDP mengalami dua kekalahan besar dalam pemilu nasional, membuat partai kehilangan kendali di kedua kamar parlemen. (The Japan Times, ist/nei)

Bedakan Nyeri Punggung Akibat Postur dan Gangguan Ginjal

Nyeri punggung sering dianggap sebagai keluhan biasa akibat postur tubuh yang kurang tepat, terutama karena jam kerja panjang di kantor. Namun, tak banyak yang menyadari bahwa sakit punggung juga dapat dipicu oleh gangguan pada ginjal.

Dikutip dari Hindustan Times pada Senin (8/9/2025), ahli urologi Ruby Hall Clinic Pune, Dr. Kshitij Raghuvanshi, menjelaskan bahwa nyeri punggung tidak selalu hanya terkait dengan masalah muskuloskeletal, melainkan juga bisa menjadi salah satu gejala awal penyakit ginjal.

“Sakit punggung tidak selalu disebabkan oleh postur tubuh yang buruk atau masalah otot. Nyeri punggung bagian atas, jika disertai perubahan urine atau pembengkakan, bisa menjadi tanda penyakit ginjal. Identifikasi dini terhadap perbedaan tersebut dapat sangat memengaruhi pengobatan dan hasil kesehatan,” katanya. Raghuvanshi berbagai perbedaan dan gejala antara s a k i t

punggung karena kesalahan postur atau disfungsi ginjal, di antaranya lokasi nyeri. Jika nyeri punggung yang normal, sebagian besar terasa di punggung bawah atau tulang belakang, dan nyeri ini dapat menjalar ke pinggul atau bokong. Nyeri punggung biasanya terasa tajam atau nyeri, dan cenderung bervariasi tergantung posisi, aktivitas, atau olahraga. Istirahat biasanya dapat meredakan nyeri.

Sementara nyeri akibat masalah ginjal terasa tepat di bawah tulang rusuk, di kedua sisi tulang belakang. Nyeri ini lebih terasa tumpul dan persisten dan umumnya tidak membaik atau memburuk dengan gerakan atau istirahat. “Nyeri dapat menjalar ke samping (pinggul) atau bahkan ke perut,” jelas Raghuvanshi.

Lebih lanjut, ia menjelaskan sakit punggung dapat meningkat ketika otot atau persendian di area tersebut ditekan atau diregangkan, sementara nyeri ginjal biasanya tidak dipengaruhi oleh tekanan atau gerakan ginjal. Gejala lain yang menunjukkan keterlibatan ginjal. Ahli urologi itu menyebutkan enam tanda lain yang dapat dijadikan landasan apakah nyeri punggung akibat postur atau ginjal.

Frekuensi Buang Air Kecil

Frekuensi buang air kecil yang lebih sering atau justru lebih jarang dari biasanya, terutama pada malam hari, dapat menjadi tanda adanya gangguan pada fungsi tubuh.

Perubahan

pola ini sebaiknya diperhatikan karena bisa berkaitan dengan kondisi kesehatan tertentu. Selain itu, urine yang tampak berbusa atau berbuih juga patut diwaspadai. Kondisi tersebut bisa menjadi indikasi adanya kebocoran protein dalam urine, yang sering dikaitkan dengan masalah pada ginjal atau sistem saluran kemih.

Darah Dalam Urine

Saat buang air kecil, muncul rasa sakit atau ketidaknyamanan yang dapat dirasakan di area kandung kemih, saluran kemih, atau bahkan di perut bagian bawah. Gejala ini sering menimbulkan rasa tidak nyaman yang mengganggu aktivitas sehari-hari, sehingga tidak boleh diabaikan begitu saja.

Kondisi tersebut umumnya berkaitan dengan masalah kesehatan seperti infeksi saluran kemih, batu ginjal, atau iritasi pada kandung kemih. Masing-masing gangguan ini memerlukan penanganan yang berbeda, sehingga penting untuk mengenali gejalanya sejak dini.

Pembengkakan (Edema)

Retensi cairan dapat muncul pada beberapa bagian tubuh seperti kaki, pergelangan kaki, telapak kaki, tangan, atau bahkan wajah. Kondisi ini biasanya terlihat sebagai pembengkakan yang disebabkan oleh penumpukan cairan berlebih di jaringan tubuh. Gejala tersebut sering kali terasa mengganggu karena membuat tubuh terasa berat dan kurang leluasa bergerak.

Penyebab utama retensi cairan adalah ginjal yang tidak mampu membuang kelebihan natrium dan air secara optimal. Ketidakseimbangan ini membuat cairan menumpuk di dalam tubuh, sehingga memicu pembengkakan pada area tertentu. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menandakan adanya penurunan fungsi ginjal yang perlu mendapatkan perhatian serius.

Jika retensi cairan dibiarkan, dampaknya bisa semakin berat, mulai dari rasa tidak nyaman hingga terbatasnya kemampuan untuk beraktivitas. Selain itu, pembengkakan juga dapat menjadi gejala awal dari gangguan ginjal kronis atau masalah kesehatan lain yang membutuhkan

pemeriksaan medis segera.

Kelelahan Terus-menerus

Adanya penumpukan produk limbah dalam darah dapat menimbulkan rasa lelah yang terus-menerus dan menurunkan kemampuan untuk berkonsentrasi. Kondisi ini terjadi karena tubuh tidak mampu membersihkan darah secara optimal, sehingga racun menumpuk dan memengaruhi fungsi organ.

Kelelahan tersebut juga bisa semakin parah akibat anemia, yang muncul karena ginjal tidak menghasilkan hormon dalam jumlah cukup untuk membantu pembentukan sel darah merah. Kekurangan hormon ini membuat tubuh kekurangan oksigen, sehingga penderita merasa cepat lelah meski tidak melakukan aktivitas berat.

Perubahan Kulit

Ketidakeimbangan mineral dan nutrisi dalam tubuh dapat terjadi ketika ginjal tidak lagi mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Normalnya, ginjal berperan penting dalam menjaga kadar mineral dan nutrisi tetap seimbang agar tubuh berfungsi secara optimal. Ketika keseimbangan ini terganggu, dampaknya dapat terlihat pada berbagai aspek kesehatan.

Salah satu dampak yang paling sering muncul adalah masalah pada kulit. Kulit menjadi kering, mudah teriritasi, dan terasa gatal yang berlangsung terus-menerus. Kondisi ini bukan hanya menimbulkan rasa tidak nyaman, tetapi juga dapat mengganggu aktivitas sehari-hari karena rasa gatal sulit diabaikan.

Gejala Pencernaan

Kehilangan nafsu makan sering kali muncul ketika terjadi penumpukan limbah dalam darah. Kondisi ini membuat tubuh terasa tidak nyaman dan mengurangi minat untuk mengonsumsi makanan, sehingga asupan gizi menjadi berkurang.

Selain itu, penumpukan limbah juga dapat menimbulkan mual atau munculnya rasa logam di mulut. Gejala ini dapat semakin memperburuk pola makan dan kesehatan secara keseluruhan, serta menjadi tanda adanya gangguan pada fungsi ginjal. (nei,ist/dya)





CUKUP PROMPT, GEMINI NANO BANANA BISA UBAH DAN BUAT GAMBAR

Google meluncurkan model AI terbaru bernama Gemini 2.5 Flash Image dengan kode nama Nano Banana, yang hadir sebagai alat untuk membuat sekaligus mengedit gambar hanya melalui prompt sederhana. Perusahaan menyebutnya sebagai model terancang dalam jajaran Gemini untuk kebutuhan pengolahan visual.

Mengutip pengumuman dari Google for Developers, Nano Banana memiliki sejumlah kemampuan utama, antara lain menggabungkan beberapa gambar menjadi satu secara mulus dapat memberikan hasil visual yang lebih menarik dan menyatu. Proses ini juga perlu menjaga konsistensi karakter dalam penceritaan visual agar alur cerita tetap jelas dan mudah dipahami. Dengan memanfaatkan instruksi berbasis bahasa alami, transformasi spesifik pada gambar dapat dilakukan dengan lebih sederhana tanpa harus melalui proses teknis yang rumit.

Selain itu, pengetahuan yang dimiliki Gemini dapat digunakan untuk tidak hanya menghasilkan gambar baru, tetapi juga mengedit gambar yang sudah ada, sehingga memberikan fleksibilitas lebih dalam menciptakan karya visual.

Dengan kemampuan tersebut, pengguna bisa mendapatkan gambar yang konsisten tanpa distorsi, meski prompt diubah-ubah.

Google menegaskan, kini tidak diperlukan lagi prompt yang rumit untuk mempertahankan konsistensi

saat melakukan modifikasi.

Sebagai contoh, gambar seorang pria bisa diubah hanya pada bagian tertentu, seperti menghapus noda di baju atau mengganti warna pakaian, cukup dengan instruksi sederhana seperti 'ubah warna bajunya'.

Nano Banana juga mendukung integrasi gambar. Misalnya, sebuah desain ruangan tanpa lampu bisa ditambahkan lampu melalui gambar terpisah, lalu model ini akan otomatis menyesuaikan agar selaras dengan nuansa ruangan tersebut.

Saat ini, Nano Banana tersedia melalui Gemini API, Google AI Studio untuk segmen pengembang aplikasi, serta Vertex AI untuk segmen korporasi. Biayanya ditetapkan USD 30 per 1 juta token keluaran, dengan setiap gambar bernilai 1.290 token atau sekitar USD 0,039 per gambar.

Mengutip laporan TechCrunch, model ini disebut sebagai penantang serius bagi pesaing seperti ChatGPT maupun Grok.

"Pembaruan ini jauh lebih baik dalam membuat dan mengedit gambar lebih mulus, dan hasil model dapat digunakan untuk apa pun yang Anda inginkan," kata Head of Visual Generation Product di Google DeepMind, Nicole Brichtova, mengutip TechCrunch.

Meski memberi pengguna kendali penuh atas gambar yang diciptakan, Google tetap menerapkan pembatasan. Pengguna dilarang membuat "gambar intim non-konsensual" dalam Nano Banana, untuk mencegah penyalahgunaan konten eksplisit. (nei,ist/dya)



HARIAN LENTERA
LENTERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENTERA TODAY"
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, NEISKA OLIVIANA (CO)

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



MEDIA TERVERIFIKASI

BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO | **GRESIK:** ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) | **MOJOKERTO:** NUR HIDAYAH | **LAMONGAN:** L HANDI | **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA | **KEDIRI:** GATOT SUNARKO | **JOMBANG :** SUTONO | **PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO :** IMAN SANTOSO | **BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI:** PURCAHYONO JULIATMOKO | **MADIUN:** WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) | **MALANG RAYA:** SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. | **MADURA RAYA:** SAHLAN KURNIAWAN | **TRENGGALEK:** TINA W | **NGAWI:** DIMAS RIDHO SURYO BASKORO | **DKI JAKARTA:** FUAD HASSAN | **LOMBOK BARAT:** MUHAYYAN | **PALANGKA RAYA:** NOVITA MASNIARI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH | **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN | **SEKERTARIS** FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILAH
DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN | **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26 | **TELP** 03187854491 | **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA | **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA | **TELP IKLAN** 031-87854491 | **NIB** 91205006801134 | **HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal wartawan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal wartawan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

Ponytail, Gaya Praktis Favorit Anak Sekolah

Model rambut ponytail atau kuncir kuda kerap menjadi pilihan andalan bagi para pelajar. Gaya ini digemari karena mudah ditata dan mampu menjaga rambut tetap rapi serta nyaman sepanjang kegiatan belajar. Tidak hanya memberikan kesan tertata, ponytail juga cocok untuk anak-anak dengan karakter aktif dan penuh semangat. Ada banyak variasi gaya ponytail yang dapat dipilih sesuai dengan selera dan kebutuhan setiap anak. Pada artikel ini, akan dibahas model ponytail lengkap dengan variasinya untuk anak sekolah, ditambah tips penataan agar tetap rapi sekaligus modis.

Ponytail Klasik

Ponytail klasik merupakan salah satu pilihan gaya rambut yang sangat diminati dan multifungsi. Gaya ini tidak hanya mudah untuk dibuat, tetapi juga memberikan kesan rapi dan anggun, sehingga sangat sesuai untuk berbagai acara di sekolah. Untuk menciptakan ponytail yang tinggi, pertama-tama bagi rambut menjadi dua bagian. Kemudian, ikat

bagian atas dan buat celah di ikatan tersebut, lalu masukkan ponytail ke dalam celah yang telah dibuat. Pastikan untuk mengikatnya dengan kuat tetapi tetap nyaman agar tidak mudah terlepas saat Anda bergerak. Di sisi lain, ponytail yang rendah menawarkan tampilan yang lebih santai dan elegan. Anda juga dapat menambahkan sedikit gelombang atau mempertahankan rambut dalam keadaan lurus untuk mendapatkan tampilan yang lebih sleek.

Kuncir Dua

Kuncir dua, yang juga dikenal sebagai pigtales, merupakan salah satu gaya rambut yang melibatkan pembagian rambut menjadi dua bagian yang diikat. Gaya rambut ini sangat cocok bagi anak-anak yang memiliki tingkat aktivitas tinggi, terutama saat mereka berada di sekolah atau sedang bermain. Dengan kuncir dua, rambut dapat disesuaikan berdasarkan panjang, tekstur, serta selera pribadi masing-masing. Selain itu, gaya ini juga berfungsi untuk mengurangi kekusutan dan simpul pada rambut, yang sangat bermanfaat bagi mereka yang memiliki rambut panjang atau tebal.

Dengan menggunakan

karet gelang untuk mengikat rambut, kuncir dua mampu memberikan tampilan yang ceria dan penuh semangat. Ini adalah pilihan yang tepat untuk anak-anak yang ingin tampil lucu dan nyaman.

Half Ponytail

Gaya setengah kuncir atau half ponytail menghadirkan nuansa yang lebih manis dan santai. Dengan gaya ini, bagian atas rambut diikat sementara bagian bawah dibiarkan terurai, sehingga menciptakan penampilan yang seimbang dan menarik. Untuk menciptakan tampilan half ponytail, cukup kumpulkan sebagian kecil rambut di bagian atas kepala dan tarik ke belakang. Selanjutnya, ikat rambut tersebut menggunakan karet yang lebih kecil agar hasilnya terlihat rapi dan teratur.

Ponytail dengan Kepang

Mengombinasikan keping dengan ponytail dapat menciptakan penampilan yang menarik dan stylish. Salah satu metode yang banyak digunakan adalah dengan membuat French braid di bagian depan sebelum mengikatnya menjadi ponytail. Untuk mencapai gaya ini, langkah pertama adalah mengepang rambut di bagian depan, lalu mengikatnya menjadi ponytail rendah. Gaya ini tidak hanya terlihat chic, tetapi juga efektif dalam menjaga agar rambut tetap rapi sepanjang hari. Selain itu, Anda juga bisa mencobanya

Twisted Ponytail

Ponytail yang diputar atau yang dikenal dengan istilah twisted ponytail merupakan pilihan gaya rambut yang sedang populer dan sangat mudah untuk diterapkan. Tekniknya melibatkan pemisahan rambut menjadi tiga bagian, lalu memutar setiap bagian ke dalam dan mengikatnya secara bersamaan.

Dengan gaya ini, ponytail yang sederhana menjadi lebih elegan dan cocok untuk berbagai kegiatan di sekolah. Anda dapat menambahkan scrunchie untuk memberikan sentuhan gaya sekaligus kenyamanan saat mengenakannya.

Twisted ponytail sangat ideal bagi anak-anak yang ingin tampil stylish tanpa harus repot. Gaya ini juga memberikan fleksibilitas untuk dipadukan dengan berbagai aksesoris rambut, sehingga dapat menambah daya tarik penampilan. Dengan kreativitas, Anda bisa membuat variasi yang unik dari gaya ini, menjadikannya pilihan yang menarik untuk berbagai kesempatan.

Layered Ponytail

Model ponytail berlapis menghasilkan tampilan yang lebih menarik dan cantik dibandingkan dengan kuncir kuda biasa. Untuk menciptakan gaya ini, pertama-tama bagi rambut menjadi empat bagian yang saling bertumpuk dari bagian atas kepala hingga ke tengkuk. Setelah membagi, ikat bagian pertama menjadi kuncir kuda, kemudian sambungkan dengan mengikat bagian kedua pada kuncir yang pertama. Proses ini diulang untuk semua bagian rambut hingga semuanya terikat.

Ponytail Bubble

Ponytail bubble atau kuncir gelembung sedang tren di 2025. Rambut diikat dengan beberapa karet sepanjang ekor sehingga membentuk gelembung-gelembung kecil. Gaya ini memberi kesan unik dan modern untuk anak sekolah. Meskipun terlihat modis, gaya ini sebenarnya sangat mudah dibuat. Cukup tambahkan karet kecil dengan jarak tertentu, lalu tarik sedikit agar membentuk gelembung. Model ini cocok digunakan saat kegiatan sekolah santai, misalnya ekstrakurikuler atau acara non-formal. (nei,ist/dya)



Reshuffle Kabinet ...dari hal 1

Usai pengumuman reshuffle cabinet, IHSG ditutup melemah 100,49 poin atau 1,28 persen ke level 7.766. Mengutip data RTI, sebanyak 232 saham tercatat menguat, 451 saham melemah, dan 121 saham stagnan. Nilai transaksi mencapai Rp19,45 triliun dengan volume perdagangan 35,82 miliar lembar saham melalui lebih dari 2,19 juta kali transaksi.

Sebelumnya, IHSG sempat dibuka menguat 61,71 poin atau 0,78 persen ke posisi 7.929,06. Namun, tekanan jual meningkat sejak sekitar pukul 15.30 WIB, sesaat setelah Menteri Sekretaris Negara Hadi Prasetyo mengumumkan perombakan kabinet Merah Putih dan diikuti pelantikan Menteri baru oleh Presiden Prabowo Subianto.

Dari lima Kementerian yang direshuffle yakni Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerja Migran Republik Indonesia, Kementerian Koperasi, serta Kementerian Pemuda dan Olahraga, salah satu yang menjadi sorotan pasar adalah pergantian Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang digantikan oleh Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa.

Terkait dengan hak ini, Ekonom Senior Indef, Mohamad Fadhil Hasan, angkat bicara. Dia menilai bahwa Sri Mulyani selama ini diakui dunia usaha maupun lembaga internasional sebagai figur yang berhasil menjaga kebijakan fiskal tetap stabil, prudent, dan berkelanjutan. Hal ini menjadikan Indonesia tetap dipercaya dalam mengelola perekonomiannya serta menarik bagi investor.

"Walau dalam beberapa tahun terakhir terutama di masa kedua Jokowi banyak melakukan akomodasi terhadap keinginan Presiden sehingga mengakibatkan semakin meningkatnya utang publik dan menurunnya kredibilitas kebijakan fiskal sendiri," kata Fadhil, Senin (8/9).

"Namun yang harus dihindarkan adalah persepsi bahwa digantinya SMI karena peristiwa penjarahan terhadap rumahnya dan dianggap kebijakannya tidak pro rakyat. Jika demikian, akan menimbulkan reaksi negatif dari dunia usaha, pasar, dan masyarakat," kata Fadhil dilansir tirto.id.

Ia menambahkan, siapapun penggantinya akan menghadapi persoalan fiskal yang rumit. "Pilihan-pilihannya tidak ada yang mudah," ujarnya.

Sebagai pengganti Sri Mulyani Indrawati, Fadhil menilai bahwa

Purbaya Yudhi Sadewa, merupakan seorang ekonom yang baik, paham persoalan, namun dia belum memiliki pengalaman secara langsung mengelola fiskal dan ekonomi secara keseluruhan.

"Jadi bisa dikatakan dia bukan pilihan terbaik. Masih ada pilihan yang lebih baik, misalnya, wamennya Suahasil," pungkasnya.

Di satu sisi, harga saham PT Gudang Garam Tbk (GGRM) malah melonjak hingga 12,5% secara tiba-tiba setelah pengumuman perombakan kabinet oleh Presiden Prabowo Subianto. Kenaikan signifikan ini terjadi di tengah tren pelemahan IHSG dan sentimen negatif yang sedang melanda perusahaan.

Meski pada penutupan perdagangan Senin (8/9/2025), IHSG terkoreksi 0,89% ke level 7.797,29, namun pergerakan saham GGRM justru berlawanan arah. Padahal, sebelumnya pada pukul 10.30 WIB, saham GGRM sempat anjlok 3,41% ke level Rp8.500 dan secara year-to-date telah melemah hingga 35,78%, dilansir suara.

Kenaikan mendadak ini diduga kuat berkaitan dengan dilantikannya Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan yang baru, menggantikan Sri Mulyani Indrawati. Sebab, selama menjabat sebagai Menteri keuangan, Sri Mulyani dikenal dengan kebijakannya yang menaikkan cukai hasil tembakau (CHT) secara berkala.

Meskipun untuk tahun 2025 ia tidak menaikkan tarif cukai, pemerintah tetap melakukan penyesuaian Harga Jual Eceran (HJE) rokok. Kenaikan tarif terakhir dilakukan pada tahun 2023, dengan besaran rata-rata 10%, diikuti oleh penyesuaian pada tahun 2024.

Sebelumnya, pada 2010 lalu, Sri Mulyani pernah mundur dari Kabinet karena dipercaya Bank Dunia untuk menjadi managing director atau direktur pelaksana. Hal itu langsung memberikan imbas negatif pada pasar saham. IHSG pada perdagangan 5 Mei 2010 anjlok 112,77 poin atau 3,81 persen akibat sentimen tersebut. IHSG saat itu berada di level 2.846,24. Ini merupakan koreksi terdalam selama perdagangan saham pada 2010.

Ketika itu, atau pada 5 Mei 2010, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menerima pengunduran diri Sri Mulyani. "Respons saya adalah saya menyetujui," kata SBY dikutip dari Republika.

Bos Bank Dunia kala itu, Zoellick menjelaskan, pemilihan Sri Mulyani adalah langkah tepat. Dia memandang Sri sebagai sosok dengan kemampuan dan pengalaman unik. Dari sudut pandang Indonesia yang masih dibelit kemiskinan, Sri memiliki reputasi internasional

untuk mewujudkan good governance.

Sementara itu, Pengamat Ekonomi Ibrahim Assuaibi mengaku tak menduga Sri Mulyani diganti. Menurutnya, Sri Mulyani merupakan menteri andalan, baik dalam Pemerintahan SBY satu kali, kemudian pemerintahan Jokowi dua kali, dan delapan bulan mengikuti Presiden Prabowo.

Ibrahim mengatakan bahwa belakangan ini Sri Mulyani mendapatkan banyak kritikan, bahkan serangan yang puncaknya ialah penjarahan rumahnya di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Selain itu, Sri Mulyani merupakan satu-satunya menteri yang diarah kediamannya, selebihnya adalah beberapa anggota DPR RI.

"Tetapi kita harus melihat juga bahwa reshuffle ini terjadi bisa saja akibat dari demonstrasi yang berujung tewasnya ojek online oleh Brimob, sehingga mengakibatkan kerusuhan yang mengarah ke makar dan terorisme dengan melakukan pembakaran halte-halte busway, kemudian DPRD dan Polres di seluruh Indonesia, dan penjarahan terhadap pejabat-pejabat negara baik dari DPR maupun kementerian," ungkapnya.

Menurut hematnya, Sri Mulyani memang sudah masuk radar untuk diganti. Hal itu seiring dengan keputusan sejumlah partai politik menonaktifkan para anggota DPR yang kontroversial dan mengalami penjarahan pula.

"Kemungkinan besar awal mula karena bahwa pejabat-pejabat dari DPR juga sudah dikeluarkan, kemudian ada pejabat sekelas menteri terkena penjarahan juga, dan mungkin masuk dalam radar reshuffle kabinet. Apalagi setelah mahasiswa dan buruh menemui Presiden Prabowo di Istana dengan membawa tuntutan 17+8," terangnya.

"Mungkin saja bahwa 17+8 tidak mungkin semuanya akan terakomodasi, mungkin ada deal-deal tertentu sehingga ada beberapa menteri yang reshuffle," lanjutnya.

Mengenai perkembangan kedepan atas digantikannya Sri Mulyani oleh Purbaya Yudha Sadewa, Ibrahim menilai bisa jadi akan ada perubahan kebijakan yang dilakukan oleh Menkeu RI baru.

"Bisa saja berganti menteri berganti juga kebijakan, kita harus ingat bahwa saat ini Pemerintah sedang fokus terhadap pembangunan rumah rakyat subsidi, kemudian koperasi merah putih, juga makan bergizi gratis yang membutuhkan dana cukup besar," ujarnya.

Ibrahim menuturkan, selama ini Kementerian Keuangan selalu melakukan lelang obligasi dan kerap kali dibeli oleh Bank Indonesia (BI) secara konsinyasi. Pembelian

yang dilakukan BI dinilai karena adanya kekhawatiran jika lelang obligasi dilemparkan ke pasar ternyata tidak begitu laku.

"Nah, ke depan seperti apa, saya juga belum tahu ya, tetapi lagi-lagi saya katakan bahwa reshuffle kabinet terhadap Menkeu Sri Mulyani ini berdampak negatif saat ini, tetapi mungkin di hari berikutnya walaupun melemah, tapi melemahnya tidak terlalu tajam. Yak arena ini memang hak prerogatif dari Presiden Prabowo Subianto," tutupnya.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto mengganti sejumlah menteri anggota Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/9/2025). Salah satu nama yang dicopot Presiden adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang oleh Ketua Dewan Komisaris Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa.

Nama Sri Mulyani sebelumnya sempat diisukan mundur usai rumahnya dijarah oleh sekelompok massa pada kerusuhan yang terjadi pada akhir Agustus lalu. Meski demikian, isu tersebut terbantahkan usai beredar foto Sri Mulyani tengah menghadiri rapat kabinet. Dan hari ini terjawab bahwa Sri Mulyani memang benar-benar hengkang dari Pemerintahan Prabowo Subianto.

Selain itu, Presiden Prabowo Subianto juga melantik Mukhtarudin sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran, Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi, Mochamad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji, dan Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah.

Sedangkan Menko Polkam dan Menpora baru belum dilantik. Lantas, siapa sebenarnya calon Menko Polkam pengganti Budi Gunawan dan Menpora pengganti Dito Ariotedjo? Mensesneg Prasetyo Hadi menyebut, Presiden untuk sementara belum menunjuk secara definitif Menko Polkam yang baru. Presiden akan menugaskan dan menunjuk Menko Polkam Ad Interim.

"Pertama, berkenaan dengan posisi Menko Polkam, untuk sementara Bapak Presiden belum menunjuk secara definitif siapa yang Beliau tugaskan menjadi Menko Polkam, sehingga untuk sementara waktu Beliau akan menunjuk Ad Interim untuk menjabat sebagai Menko Polkam," tuturnya kepada wartawan usai pelantikan anggota Kabinet Merah Putih baru di Istana Negara, Jakarta, Senin (08/09/2025).

Saat ditanya, apakah Presiden akan menunjuk Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin sebagai pengganti Budi Gunawan, Prasetyo mengatakan, "tunggu dulu, ini kan sebelum ditandatangani kita gak bisa sampaikan."(abh,ant,ist/lut)



DPRD JATIM DAN GUBERNUR SEPAKATI PERUBAHAN APBD 2025

SURABAYA— DPRD Jawa Timur (Jatim) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) akhirnya menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah. Persetujuan ini diambil dalam Rapat Paripurna DPRD Jatim yang digelar pada Senin (8/9/2025).

Ketua DPRD Jawa Timur, Musyafak Rouf, menyampaikan kesimpulan rapat paripurna setelah seluruh fraksi memberikan pendapat akhir masing-masing.

“Disimpulkan seluruh fraksi menerima dan menyetujui P-APBD 2025 menjadi perda. Namun ada beberapa catatan dari fraksi-fraksi yang perlu diperhatikan Pemprov Jatim untuk perbaikan selanjutnya,” tegas Musyafak Rouf.

Diketahui, sejumlah fraksi di DPRD Jawa Timur memberikan catatan kritis, mulai dari isu keberpihakan terhadap rakyat kecil, arah pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga persoalan transparansi pengelolaan pajak daerah.

Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD Jatim, Agus Black Hoe menegaskan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 harus berpihak pada rakyat kecil. Menurutnya, Fraksi PDIP selalu berpijak pada prinsip keberpihakan terhadap rakyat kecil, memperkuat kemandirian daerah, serta memastikan setiap rupiah dalam APBD digunakan untuk kepentingan publik secara adil, transparan, dan akuntabel.

“Setiap angka dalam APBD, setiap alokasi, dan setiap kebijakan anggaran sesungguhnya mewakili harapan rakyat yang mendambakan keadilan, kesejahteraan, dan kemajuan,” ungkapnya.

Agus menyoroti penurunan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2025 akibat perubahan regulasi. Ia menegaskan perlunya strategi optimalisasi PAD melalui intensifikasi, ekstensifikasi, dan penguatan peran BUMD.

Selain itu, ia juga menekankan struktur belanja daerah yang masih didominasi belanja operasi sebesar 72 persen, sedangkan belanja modal hanya 9 persen. PDIP menekankan



Gubernur Provinsi Jatim, Khofifah bersama Ketua DPRD Jatim, Musyafak Rouf dan jajaran pimpinan dalam penyerahan berita acara Persetujuan Bersama Penetapan Raperda tentang Perubahan APBD Jatim Tahun Anggaran 2025, Senin (8/9/2025).

perlunya pergeseran ke belanja produktif seperti infrastruktur, pelayanan publik, dan pengembangan SDM.

Fraksi PDIP juga menyinggung digitalisasi dan green economy. Meski program e-budgeting, e-katalog, dan energi terbarukan sudah disebutkan, indikator keberhasilan serta target terukur belum dijelaskan.

“Jawaban eksekutif masih cenderung normatif dan retorik. Kami mendorong agar setiap kebijakan dilengkapi indikator yang jelas serta terukur,” tegas Agus.

Tak hanya itu, Agus mengingatkan risiko lonjakan defisit dalam P-APBD 2025 yang melebar menjadi Rp4,397 triliun atau 15,3 persen dari total pendapatan daerah. Meski dinilai masih aman, defisit harus diarahkan untuk belanja produktif.

“Setiap rupiah defisit maupun pinjaman daerah harus memberi manfaat langsung bagi wong cilik Jawa Timur,” ujarnya.

“APBD harus menjadi instrumen politik anggaran untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Jawa Timur, bukan sekadar dokumen administrasi,” paparnya.

Senada dengan hal tersebut, Fraksi Partai Gerindra menekankan pentingnya agar kebijakan anggaran benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat luas. Juru Bicara Fraksi Gerindra, Eko Wahyudi, menyoroti perlunya arah pembangunan infrastruktur yang mendukung swasembada pangan.

“Pembangunan infrastruktur harus diarahkan untuk mendukung swasembada pangan, termasuk perbaikan jalan pertanian dan irigasi,” tegas Eko Wahyudi.

Menurutnya, peningkatan kualitas infrastruktur pertanian berdampak langsung pada produktivitas petani, efisiensi distribusi hasil panen, hingga pengurangan biaya produksi.

Selain itu, Fraksi Gerindra juga meminta percepatan realisasi program listrik gratis dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) untuk desa miskin serta pondok pesantren.

“Kami juga meminta percepatan realisasi program listrik gratis dan PLTS untuk desa miskin dan pondok pesantren,” ujarnya.

Eko menilai, program ini tidak hanya mewujudkan pemerataan akses energi, tetapi juga memperkuat peran pondok pesantren sebagai pusat pendidikan.

Dalam bidang pendidikan, Fraksi Gerindra menekankan pentingnya penambahan anggaran untuk gaji guru, pemberian beasiswa, serta rehabilitasi sekolah.

“Untuk sektor pendidikan, kami meminta tambahan anggaran untuk gaji guru, beasiswa, dan rehab sekolah guna memastikan kualitas pendidikan yang merata,” jelasnya.

“Di bidang kesehatan, anggaran rumah sakit provinsi harus ditingkatkan agar mampu beradaptasi dengan sistem KRIS BPJS,” imbuh Eko.

Sementara itu Juru Bicara Fraksi Golkar, Hasan Irsyad, menyoroti

penurunan pungutan pajak kendaraan bermotor di semester pertama tahun ini.

“Pungutan pajak di semester-1 untuk roda-2 mengalami penurunan 11,34 persen dan roda-4 turun 24,34 persen dibanding semester/tahun yang lalu,” ungkap Hasan.

Meski ada target penambahan penerimaan dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Hasan menekankan kehati-hatian dalam optimalisasi pajak dan retribusi agar tidak memberatkan masyarakat. Ia mengingatkan pentingnya memberi peluang keringanan atau kemudahan bagi wajib pajak sebagaimana telah dilakukan Pemprov Jatim.

Fraksi Golkar juga menyoroti proyeksi penerimaan dari efisiensi anggaran dalam P-APBD 2025 sebesar Rp1,173 triliun.

“Penerimaan dari efisiensi anggaran pada P-APBD diproyeksikan 1 triliun 173 miliar lebih, agar benar-benar digunakan untuk mendanai program prioritas dan juga memperhatikan hasil kesepakatan tanggal 11 Agustus 2025 baik yang kategori 'terikat' maupun yang 'bebas' penggunaan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan tujuannya,” tegasnya.

Untuk itu, Fraksi Golkar mengajak eksekutif dan legislatif untuk lebih terbuka dan aspiratif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus mendorong kolaborasi dengan berbagai komponen daerah untuk mencegah aksi destruktif secara persuasif.

“Fraksi Partai Golkar mendukung upaya pembenahan dan peningkatan kinerja Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur baik dari aspek regulasi maupun pelaksanaannya,” imbuhnya.

Tak hanya itu, Golkar juga mendorong penguatan fungsi pengawasan, baik internal maupun eksternal, agar dijalankan secara nyata dengan data capaian akurat tanpa menutupi kekurangan.

“Fraksi Partai Golkar juga mendorong agar dilakukan penguatan fungsi pengawasan program (pengawas internal maupun eksternal) benar-benar dijalankan secara riil, dengan data capaian yang akurat tanpa indikasi menutupi kekurangan/kelemahan,” pungkask Hasan.(adv,pra/dya)